



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kapten A. Rivai No. 51
Palembang - 30129

Telp. (0711) 352005, 363125
Kotak Pos : 1132

Fax : (0711) 363125
E-Mail : dishubsumsel2019@gmail.com
Home Page : <http://www.dishub.sumselprov.go.id>

Palembang, 16 Juli 2026

Kepada Yth.
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
di -
Palembang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.5.3.1/4930/1/Dishub/2026

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Penyampaian Laporan Pengukuran Kinerja dan Konsolidasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan TW II Tahun 2026	1 Dokumen	Disampaikan dengan hormat.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196906081990091001

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas.

2. Sasaran

- a) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
- b) Meningkatnya Layanan Transportasi
- c) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

3. Belanja Program APBD dan Program APBN

Total Pagu Anggaran Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 46.047.139.208,- (empat puluh enam milyar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah).

Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Program, 25 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c) Program Pengelolaan Pelayaran;
- d) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Indikator yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a) Rasio Konektivitas Transportasi;
- b) Rata-rata Load Factor Angkutan Umum;
- c) V/C Rasio Jalan Provinsi.

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

a) Kota Palembang

Terdapat 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

b) Semua Kab/Kota, Kecamatan/Kelurahan

Terdapat 29 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang);
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang);
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal;
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi;
- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi;
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan Penyusunan laporan ini adalah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun berjalan serta sebagai bahan masukan SKPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan ini pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

a) Realisasi Total Belanja

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	46.047.139.208	16.671.663.863	40.00%	36.21%	45.00%	36.85%

b) Realisasi Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer)

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Operasi	42.886.039.208	16.671.663.863	40.00%	38.87%	45.00%	38.87%
Belanja Modal	3.161.100.000	0	40.00%	0%	45.00%	0%
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

No	Interval Nilai Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi
1	90% ≤ 100%	Tinggi	Hijau
2	66% ≤ 90%	Sedang	Kuning
3	0% ≤ 65%	Rendah	Merah

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN di Provinsi Sumatera Selatan

Nomor Satker / Nama Program/ Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kode Satker	-	-	-	-
Nama Program	-	-	-	-
Nama Kegiatan	-	-	-	-

a) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada :

1) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,388	0,386	99,48
2	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum	Persentase	71,50	52,24	73,06
3	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,660	0,62	93,93

2) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,388	0,386	99,48
2	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum	Persentase	71,50	52,24	73,06
3	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,660	0,62	93,93

b) Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

- 1. Bhakti Sosial Donor Darah Tahun 2022.
- 2. Pendukung Kegiatan PERTIKARA Nasional IV Tahun 2022.
- 3. Partisipasi dan Dedikasi dalam Mensukseskan Hari Keluarga Nasional Ke- 30 Tahun 2023.
- 4. Pembina Terbaik I Pemilihan Pelajar Pelopor LLAJ Tingkat Nasional Tahun 2024.

5. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden RI Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
6. Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan Kepada Perangkat Daerah yang Responsif Gender Pada Peringatan Hari Ibu Ke – 97 Tahun 2025.

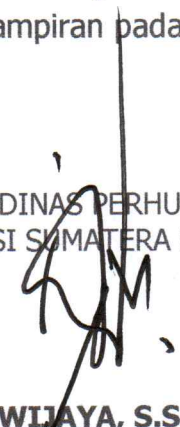
III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

- a. Kendala
Adanya penyesuaian anggaran sehingga penyerapan belum maksimal.
- b. Tindak Lanjut yang diperlukan
Perlu penyesuaian kerja agar penyerapan anggaran dapat maksimal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi bahan evaluasi, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN


MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JUNI/TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2026						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Bidang Perhubungan					46.047.139.208	16.671.663.863	36,21	36,98				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%		37.445.812.960	15.918.887.954	42,51	42,93				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	79%		228.000.000	38.297.085	16,80	17,86				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen		57.000.000	4.269.615	7,49	8,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		30.000.000	4.322.340	14,41	15,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		30.000.000	19.845.000	66,15	70,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1 Dokumen		36.000.000	4.861.800	13,51	15,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen		25.000.000	4.998.330	19,99	21,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	%	89%		25.162.152.960	12.421.502.385	49,37	49,51				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	139 Orang/Bulan		24.697.152.960	12.315.651.380	49,87	50,00	DAU/APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen		400.000.000	101.360.500	25,34	26,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 Dokumen		25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen		20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen		20.000.000	4.490.505	22,45	23,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Penataan Barang Milik Daerah Semakin Baik	%	87%		399.750.000	14.952.350	3,74	4,13				
13	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		309.750.000	8.152.350	2,63	3,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
14	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		90.000.000	6.800.000	7,56	8,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah	%	84%		179.960.000	13.702.900	7,61	8,05				
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5 Orang		90.500.000	13.702.900	15,14	16,00	APBD	Sumsel dan Luar Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200 Orang		89.460.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Layanan Umum Perangkat Daerah Semakin Baik	%	89%		821.000.000	277.376.843	33,79	34,45				
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket		30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen		48.000.000	11.500.000	23,96	25,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
19	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10 Paket		40.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan		56.000.000	27.292.900	48,74	50,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan		426.000.000	238.583.943	56,01	57,00	APBD	Sumsel dan Luar Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen		221.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Penyelesaian Tugas Kantor	%	86%		5.525.400.000	2.024.858.730	36,65	38,19				
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat yang Tersedia	Laporan	1 Laporan		5.000.000	2.000.000	40,00	40,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	Laporan	1 laporan		668.000.000	158.448.730	23,72	25,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Laporan	1 laporan		4.852.400.000	1.864.410.000	38,42	40,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Terpelihara	%	82%		1.129.550.000	61.917.000	5,48	7,73				
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12 Unit		272.000.000	15.529.500	5,71	13,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32 Unit		519.800.000	46.387.500	8,92	10,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
28	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	1 Unit		73.250.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
29	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1 Unit		31.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Gedung	2 Gedung		133.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	412 Unit		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VIII	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	%	79%		4.000.000.000	1.066.280.661	26,66	26,66				
32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit kerja		4.000.000.000	1.066.280.661	26,66	26,66	BLUD	Banyuasin		Faktor Pendorong : Koordinasi dengan bagian perencanaan dan panitia PBJ / Faktor Penghambat : Sedang dalam proses administrasi dokumen PBJ
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	52%		6.811.746.248	507.426.828	7,45	9,32				
I	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	%	69%		338.740.000	4.478.000	1,32	1,45				

33	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		94.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
34	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi	Dokumen	1 Dokumen		244.740.000	4.478.000	1,83	2,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
II Penyediaan Unit Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Panjang Ruas Jalan Provinsi yang dipasang Perlengkapan Jalan	Km	10 Km		2.131.705.498	0	0,00	0,00				
35	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6 Unit		2.131.705.498	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah terminal tipe B yang dikelola	Terminal	7 Terminal		1.250.048.750	163.596.388	13,09	13,84				
36	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal	7 Terminal		1.068.248.750	152.702.388	14,29	15,00	APBD	Sumsel	Kemiskinan Ekstrem	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
37	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terhabilitasi dan Terpelihara	Terminal	7 Terminal		181.800.000	10.894.000	5,99	7,00	APBD	Sumsel	Kemiskinan Ekstrem	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Simpang yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Simpang	4 Simpang		1.697.812.000	101.255.280	5,96	12,61				
38	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		54.800.000	450.000	0,82	1,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
39	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		1.612.700.000	97.262.280	6,03	13,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
40	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		30.312.000	3.543.000	11,69	13,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
V Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	%	37%	-	27.900.000	0	0,00	0,00				
41	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Laporan	1 Laporan	-	27.900.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VI Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang tersedia	%	79%		88.700.000	18.812.660	21,21	22,00				
42	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang dilakukan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terminal	7 Terminal		88.700.000	18.812.660	21,21	22,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

VII	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	79%		1.217.700.000	219.284.500	18,01	18,31				
43	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		323.200.000	219.284.500	67,85	69,00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
44	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	6 Unit		894.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel	Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VIII	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Izin Trayek yang dikeluarkan	%	67%		59.140.000	0	0,00	0,00				
45	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan Izinnya	Unit	25 Unit		59.140.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel	Kemiskinan Ekstrem	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	%	32%		1.619.712.000	182.297.769	11,25	15,70				
I	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	%	67%		154.352.000	0	0,00	0,00				
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Laporan	1 Laporan		154.352.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
II	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lintasan yang Tersedia	Lintasan	1 Lintasan		66.000.000	0	0,00	90,00				

47	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan		66.000.000	0	0,00	90,00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Persentase Jumlah Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	%	68%		50.360.000	24.569.376	48,79	50,00				
48	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen		50.360.000	24.569.376	48,79	50,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun	Pelabuhan	1 Pelabuhan		867.000.000	69.172.426	7,98	8,76				
49	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1 Unit		584.300.000	69.172.426	11,84	13,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
50	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	1 Unit		282.700.000				APBD	Banyuasin		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
V	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	Pelabuhan	1 Pelabuhan		353.000.000	68.391.605	19,37	20,00				

51	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan		353.000.000	68.391.605	19,37	20,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
VI	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan yang Memiliki Izin Usaha yang diterbitkan untuk BUP	Pelabuhan	1 Pelabuhan		129.000.000	20.164.362	15,63	18,00				
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen		129.000.000	20.164.362	15,63	18,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	%	81%		169.868.000	63.051.312	37,12	37,97				
I	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		36.668.000	0	0,00	0,00				
53	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringanannya Kewenangan Provinsi	Orang	200 Orang		36.668.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
II	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Tersedianya Dokumen Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	%	24%		76.700.000	57.357.698	74,78	76,00				
54	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Orang	300 Orang		76.700.000	57.357.698	74,78	76,00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
III	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Tersedianya Dokumen Izin Kereta Api Khusus	%	28%		56.500.000	5.693.614	10,08	11,00				

55	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen		56.500.000	5.693.614	10,08	11,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	Jumlah					46.047.139.208	16.671.663.863	36,21	36,98				

Palembang, Juli 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi TW II	Capaian TW II %	Faktor Penghambat / Pendorong	Keterangan
1	2	3	4	5			8	8
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur konektivitas yang berkualitas	V/C Rasio Jalan Provinsi	Rasio	0,388	0,386	99,48%	Faktor Penghambat : kapasitas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan volume kendaraan Faktor Pendorong : Dukungan kebijakan pengaturan lalu lintas	
		Rata - rata load factor angkutan umum	%	71,50%	52,24%	73,06%	Faktor Penghambat : Minat masyarakat terhadap angkutan umum masih rendah Faktor Pendorong : Sosialisasi dan kampanye penggunaan angkutan umum	Kereta Api memiliki load factor tertinggi sebesar 77,18%, menunjukkan tingkat pemanfaatan yang relatif optimal dan permintaan yang tinggi dibanding moda lainnya. AKDP mencatat load factor 59,33%, berada di atas rata-rata keseluruhan sehingga masih menunjukkan tingkat keterisian yang cukup baik. Angkutan Laut dan LRT memiliki load factor yang hampir sama, yaitu 39,31% dan 39,00%, jauh di bawah rata-rata. Hal ini mengindikasikan kapasitas yang tersedia belum termanfaatkan secara maksimal.
2	Meningkatnya Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,660	0,62	93,93%	Faktor Penghambat : Jaringan transportasi belum menjangkau seluruh wilayah Faktor Pendorong : Pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi	Bidang Pelayaran, Bidang Angkutan

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera SelatanMUSNI WUJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001